

Posisi Perempuan dalam Revolusi Prancis Abad 18

Ray Silva¹, Azmi Fitriasia², Hendra Naldi³, Ezra Olly Ompi⁴

^{1,2,3}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

⁴Universitas Andalas

(*)rayys0982@gmail.com

ABSTRACT

The 18th-century French Revolution stands as one of the most significant events in world history, ushering in sweeping changes in social, political, and economic structures. This article aims to explore and analyze the involvement of women in various revolutionary activities, as well as the changes in their rights and social positions during and after the revolution. The research methodology employed is historical research, encompassing heuristic approaches, source criticism to assess authenticity and data credibility, interpretation to understand the context and significance of events, and historiography. The findings reveal that women played crucial roles during the French Revolution in advocating for gender equality. The research elucidates that women were actively involved in various aspects of the revolution, including demonstrations, political organizations, and advocacy for their rights. Although many of their demands were not immediately realized post-revolution, their contributions planted seeds for future feminist movements and paved the way for broader social change.

Keywords: *Women, French Revolution, Equality.*

ABSTRAK

Revolusi Prancis abad ke-18 merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia, yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas revolusioner, serta perubahan yang terjadi dalam hak-hak dan posisi sosial mereka selama dan setelah revolusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi heuristik, kritik sumber untuk menilai keaslian dan kredibilitas data, interpretasi untuk memahami konteks dan makna peristiwa dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tokoh perempuan yang berperan pada saat revolusi Prancis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Penelitian menjelaskan bahwa perempuan juga berperan aktif dalam berbagai aspek revolusi, termasuk demonstrasi, organisasi politik, dan advokasi hak-hak mereka. Meskipun banyak dari hak-hak yang mereka perjuangkan tidak segera diwujudkan pasca revolusi, kontribusi mereka menanam benih-benih penting bagi gerakan feminis masa depan dan membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci : *Perempuan, Revolusi Prancis, Kesetaraan.*

PENDAHULUAN

Revolusi Perancis adalah salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah dunia. Era ini telah menjadi subjek penelitian yang tak terhitung jumlahnya dan juga disebut-sebut sebagai inspirasi bagi revolusi di seluruh dunia (Scoot & Mentor, 2022). Tuckett menulis revolusi ini terjadi sekitar tahun 1787–1789 (Tackett, 2015). Pada tahun 1789, Raja Louis

XVI berkuasa sebagai raja absolut yang berkuasa. Benih penyebab revolusi bermula dari masa Lodewijk XIV, berlanjut hingga masa Lodewijk XV. Kejadian sedikit berbeda pada masa Lodewijk XVI. Pada masa itu, ia hidup bersama permaisurinya yang bernama Marie Antoinette (Scoot & Mentor, 2022). Peristiwa ini terjadi juga didasarkan pada gagasan bahwa manusia termotivasi, setidaknya di saat-saat pergolakan besar, bukan hanya karena perhitungan rasional kepentingan materi mereka tetapi juga oleh ikatan afektif dan kepekaan, kebiasaan, dan norma-norma kata (Rosenfeld, 2019). Sebab kehancuran dari kekuasaan Lodewijk XVI adalah sikap hedonisme kalangan istana yang akhirnya memicu gerakan (Rokhim et al., 2023).

Menurut Tocqueville, faktor utama penyebab Revolusi Perancis yaitu ; Pertama, munculnya ide-ide politik dan sosial Pencerahan. Kedua, terjadinya pemberontakan melawan kekuasaan monarki absolut. Para bangsawan tidak hanya memikirkan ide-ide tetapi juga menyusun serangkaian peristiwa yang akan berujung pada sebuah Revolusi (Emmanuel Guerisoli, 2018). Berbicara tentang penyebab revolusi, Tuckett dan McPhee dengan jelas menunjuk pada krisis keuangan yang diakibatkan oleh partisipasi Prancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika (Bruto, 2017). Krisis yang dialami rezim ini disebabkan oleh tiga penyebab yang saling berhubungan: “peningkatan belanja kekaisaran, kegagalan elit penguasa dalam memerangi krisis keuangan, dan perubahan budaya politik dan persepsi publik yang melemahkan legitimasi monarki absolut dan aristokrasi (McPhee, 2016).

Revolusi Prancis tahun 1794 merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah dunia, yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas merupakan periode perubahan besar di seluruh Eropa (Robitaille, 2009). Revolusi ini tidak hanya mengguncang tatanan lama yang feodal, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sayangnya, konteks Hak Asasi Manusia yang ada dalam UUD 1791 bentuk penerapannya ternyata hanya condong terhadap hak untuk laki-laki (Çakmak, 2007) . Padahal, di balik hiruk-pikuk dan kekerasan yang sering dikaitkan dengan revolusi ini, terdapat kontribusi signifikan dari kelompok yang sering kali diabaikan dalam narasi sejarah utama, yaitu perempuan. Posisi dan peran perempuan dalam Revolusi Prancis adalah aspek penting yang perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial dan politik yang terjadi selama periode tersebut.

Sebelum revolusi, perempuan di Prancis berada dalam posisi yang sangat terpinggirkan. Hak-hak mereka terbatas, baik dalam ranah sosial, hukum, maupun politik. Meskipun mereka memainkan peran penting dalam keluarga dan ekonomi rumah tangga, akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi politik sangat dibatasi. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam situasi di mana mereka harus berjuang tidak hanya melawan ketidakadilan yang dialami oleh seluruh rakyat Prancis, tetapi juga melawan penindasan berbasis gender yang mengakar kuat dalam masyarakat. Sehingga, Revolusi Perancis menjadi titik balik dalam perjuangan untuk menyatakan

bahwa perempuan bersama dengan laki-laki juga berperan dalam mewakili kemanusiaan. Selama Revolusi, perempuan menunjukkan bahwa mereka tidak kalah pentingnya dengan laki-laki sebagai warga negara (Çakmak, 2007)

Pada penelitian yang ditulis oleh Diren Çakmak dengan judul "*Wanita Dalam Revolusi Prancis: Warga yang Hilang*" dikatakan bahwa terjadi ketimpangan distribusi peran dalam Revolusi Prancis. Namun faktanya Revolusi Prancis membuka lembaran baru dalam sejarah perempuan. Selanjutnya, Tiffany R Thompson dalam tulisannya yang berjudul "*Bangsa Gender: Revolusi Prancis dan Partisipasi Politik Perempuan*" mengatakan, meskipun masyarakat umum menerima bahwa laki-laki dan perempuan adalah kekuatan yang saling melengkapi namun dalam aktivitas politik mereka mengalami perlakuan yang berbeda saat itu (sebelum revolusi Prancis).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran serta posisi perempuan selama Revolusi Prancis abad ke-18. Dengan menggali berbagai aspek keterlibatan perempuan, mulai dari partisipasi aktif dalam demonstrasi dan organisasi revolusioner hingga pengaruh dan dampak jangka panjang dari tindakan mereka, artikel ini berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kontribusi perempuan terhadap revolusi. Penelitian ini juga akan mengkaji perubahan yang dialami oleh perempuan pasca revolusi, termasuk evaluasi terhadap sejauh mana revolusi berhasil memenuhi aspirasi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kualitatif yang menggunakan metode penelitian sejarah dengan rancangan deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji posisi perempuan dalam Revolusi Prancis abad ke-18. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah) (Metha Jaya, 2020). Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian ini dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Tahap heuristik melibatkan pengumpulan data dan sumber-sumber historis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperlukan mencakup buku-buku sejarah, artikel-artikel jurnal, serta catatan lainnya yang berkaitan dengan Revolusi Prancis. Selain itu, data statistik tentang populasi, partisipasi perempuan dalam revolusi, dan perubahan sosial-ekonomi juga akan dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Tahap interpretasi melibatkan analisis dan pemahaman mendalam terhadap data yang telah diverifikasi. Penelitian ini berfokus pada konteks sejarah, peran perempuan, dampak dan perubahan serta kesetaraan gender. Penulis mencari sumber dari artikel nasional dan internasional, bahkan yang terindeks Scopus, yang berkaitan dengan Revolusi Prancis abad 18. Sumber-sumber ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana revolusi industri mempengaruhi peran perempuan dan kesetaraan gender pada masa itu. Terakhir adalah tahap historiografi, yang akan menyusun dan menginterpretasikan temuan-temuan dalam narasi sejarah yang koheren. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang sistematis dan komprehensif ini, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan akurat mengenai perubahan sosial dan peran perempuan selama Revolusi Prancis tersebut. (Aditia Muara Padiatra, 2020) (Nina Herlina, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Perempuan dalam Revolusi

Peristiwa Revolusi Prancis pada abad 18 menjadi awal perubahan tatanan dunia guna melepaskan diri dari belenggu perbudakan (Rokhim et al., 2023). Revolusi Perancis terjadi karena penderitaan dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Sosial Stratifikasi, kelas ekonomi, dan penindasan kaum bangsawan terhadap masyarakat miskin menjadi beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut. Situasi di Perancis saat itu sangat buruk (Syawal et al., 2022). Pada pertengahan tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an revolusi Perancis mampu menghancurkan sistem pemerintahan monarki absolut. Dimana pada masa itu keadaan keuangan sangat parah krisis dan adanya kesenjangan bahkan diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Pada saat itu, Bangsawan memerintah secara sewenang-wenang, sehingga masyarakat miskin sangat menderita. Kesejahteraan para bangsawan adalah sangat diunggulkan, sementara kondisi perekonomian rakyat kecil terlalu terabaikan. Bahkan masyarakat dibebani dengan pajak yang sangat menyesakkan di leher (Syawal et al., 2022).

Awal revolusi ditandai pada 14 Juli 1789 di Bastille. Bastille telah menjadi simbol penting tatanan lama di Paris, yang ditakuti oleh rakyat Prancis (Rokhim et al., 2023) sebuah situs yang hampir sepenuhnya tidak memiliki kepentingan militer, namun tetap menjadi gambaran dominan monarki (Livesey, 2009). Kelompok besar petani dan buruh menyerbu otoritas kerajaan. Raja dan keluarganya segera diseret ke penjara, mengantarkan pada kematian mereka.

Selama Revolusi Prancis, perempuan memainkan peran yang jauh lebih aktif dan berpengaruh dibandingkan sebelumnya, meskipun mereka tetap menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Perempuan dari berbagai latar belakang sosial mulai terlibat langsung dalam aksi-aksi revolusioner, baik melalui demonstrasi, penulisan pamflet, maupun keanggotaan dalam berbagai organisasi politik. Sastra memiliki status tinggi di komunitas mana pun sejak zaman kuno hingga era modern (Rahman & Weda, 2018). Dapat disimpulkan bahwa sastra adalah sebuah hasil seni di masyarakat. Indikasi perilaku sosial pada suatu masyarakat tertentu mencerminkan aktivitas kehidupan manusia, serta masalah sosial, ekonomi, dan politik. Manusia membutuhkan media untuk menyuarakan pendapatnya terhadap suatu tragedi di suatu zaman dan masa tertentu. Seringkali pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat, khususnya, masyarakat kelas bawah menolak peraturan tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dan pada akhirnya menimbulkan a revolusi salah satu contohnya adalah Revolusi Perancis (Syawal et al., 2022). Salah satu peristiwa paling terkenal adalah Peristiwa Versailles pada Oktober 1789, di mana ribuan perempuan, terutama dari kelas pekerja, berbaris dari Paris ke Istana Versailles menuntut roti dan perubahan politik. Aksi

ini menandai salah satu titik balik penting dalam revolusi, menunjukkan keberanian dan kekuatan kolektif perempuan dalam menekan pemerintah (Syawal et al., 2022).

Tokoh-tokoh perempuan seperti Olympe de Gouges juga menjadi suara penting dalam revolusi. Olympe de Gouges menulis "Deklarasi Hak-Hak Perempuan dan Warga Perempuan" (1791), sebuah dokumen yang menantang Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dianggap tidak cukup mengakomodasi hak-hak perempuan. Dalam tulisannya, de Gouges menyerukan kesetaraan gender, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kebebasan yang sama bagi perempuan. Meskipun akhirnya ia dieksekusi karena pandangan politiknya yang radikal, kontribusinya meninggalkan warisan yang mendalam dalam perjuangan hak-hak perempuan (Thompson, 2015).

Sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan hak-hak perempuan selama Revolusi Prancis, Theroigne de Mericourt, merupakan anak seorang petani dan seorang anti-monarki. Theroigne de Mericourt berpendapat bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dianggap sebagai salah satu slogan revolusi, namun harus diwujudkan dalam kehidupan politik, ilmu pengetahuan, dan pekerjaan sehari-hari. Theroigne de Mericourt juga mendirikan klub wanita di pinggiran Saint Antoine (ÇAKMAK, 2007). Klub ini memberikan akses kepada perempuan Prancis pada dunia politik meskipun pada kenyataannya mereka tidak dianggap sebagai warga negara yang aktif. Sebagai seorang pejuang hak, dia terus berupaya untuk memajukan posisi perempuan dalam masyarakat dengan mengadvokasi partisipasi politik yang lebih besar dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Peran dan perjuangannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap gerakan kesetaraan gender pada masa Revolusi Prancis dan menginspirasi banyak perempuan lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. (Thompson, 2015).

Selama Revolusi Prancis, muncul perempuan yang tampil sebagai pemimpin dan pendukung aktif dalam perjuangan untuk hak-hak sipil dan kesetaraan gender. Etta Palm D'Aelders merupakan pendiri unit asosiasi perempuan. Ia mengadakan pertemuan pertama mereka pada tanggal 25 Maret 1791 dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak sipil perempuan seperti perceraian dan hak waris. Asosiasi ini merupakan sebuah organisasi amal yang dijalankan oleh perempuan kaya. Palm D'Aelders berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak-hak sipil perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam ranah publik. Selanjutnya, juga berdiri Asosiasi Warga Wanita Republik Revolusioner di bawah kepemimpinan Pauline Léon. Anggota asosiasi memakai pita tiga warna melambangkan republik serta menjadi salah satu simbol kewarganegaraan dan membawa pistol, walaupun pada saat itu perempuan dilarang membawa senjata. Tuntutan utama asosiasi ini adalah hukum harga tetap, kesetaraan, dan kebebasan. Asosiasi ini menjadi platform bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak yang setara, menciptakan contoh penting yang akan menginspirasi dan mempengaruhi gerakan perempuan di masa depan. (ÇAKMAK, 2007).

Asosiasi klub perempuan selama Revolusi Prancis mengadvokasi kesetaraan gender sebagai fondasi utama masyarakat yang adil. Mereka berpendapat bahwa perempuan harus

memiliki hak-hak sipil yang setara dengan laki-laki, termasuk hak perceraian, hak waris, dan partisipasi politik. Klub-klub ini, seperti yang dipimpin oleh Etta Palm D'Aelders, berfungsi sebagai jalan bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkan perubahan konkret dalam hukum dan kebijakan. Dengan mengenakan pita tiga warna melambangkan republik dan berani membawa senjata meskipun dilarang, anggota asosiasi menunjukkan tekad mereka untuk dianggap sebagai warga negara penuh. Mereka percaya bahwa kesetaraan harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, dari politik hingga pekerjaan, dan bahwa perempuan memiliki peran yang krusial dalam membentuk masa depan bangsa. Perspektif ini menandai langkah penting dalam sejarah gerakan perempuan, memberikan preseden bagi perjuangan hak-hak perempuan di masa depan. Namun kenyataannya, Asosiasi dan klub-klub yang didirikan ini direspon penolakan oleh kaum laki-laki. Pemerintah mengangkat isu hak-hak perempuan dalam diskusi yang membahas tentang fenomena berdirinya perkumpulan perempuan tersebut (Thompson, 2015). Pada pertengahan Oktober 1793, Anggota Dewan Jacobin berkata:

“Klub-klub ini tidak terdiri dari ibu-ibu dari keluarga, keluarga dan anak perempuan mereka, gadis-gadis yang merawat saudara-saudara mereka, tetapi mereka terdiri dari orang-orang Amazon yang suka berpetualang dan gelandangan yang telah memilih kebebasan”. (Marit, 1996)

Padahal kenyataannya, perempuan bertemu di klub-klub ini untuk mengevaluasi undang-undang, mendiskusikan artikel surat kabar, dan terlibat dalam kegiatan saling membantu. Klub utama adalah Law Friends Club dan Revolutionary Republican Women Citizens Association. Klub Teman Hukum didirikan oleh Théroigne de Méricourt. Perempuan membaca buku di sini, mendiskusikan isu-isu dalam agenda negara dan terlibat dalam urusan sosial (ÇAKMAK, 2007).

Peran Perempuan dalam Peristiwa Revolusi

Perempuan juga memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa Revolusi Prancis. Salah satu kontribusi paling mencolok adalah keterlibatan mereka dalam peristiwa Versailles. Meskipun tidak diakui sebagai warga negara, perempuan Prancis berperan aktif dalam peserta Revolusi Perancis sejak awal. Pada tanggal 5 Oktober 1789, wanita Paris berbaris ke Versailles untuk meminta roti dari raja dan mengantarnya kembali ke Paris (Thompson, 2015). Namun kenyataannya, terjadi ketimpangan distribusi peran pada masa Revolusi Perancis. Perempuan yang ikut bergerak dalam revolusi mempunyai citra yang buruk di mata laki-laki. Peran yang diakui adalah laki-laki akan mengurus politik di ranah publik dan perempuan akan mengurus keluarganya di ranah privat. Selama berabad-abad, perempuan berperan sebagai pelengkap laki-laki, dan hal ini tidak bisa diharapkan berubah secara tiba-tiba seiring dengan terjadinya Revolusi (Çakmak, 2007).

Selain aksi-aksi jalanan, perempuan juga terlibat dalam organisasi-organisasi politik dan revolusioner. Misalnya, Théroigne de Méricourt, Théroigne de Méricourt dan Etta Palm D'Aelders. Asosiasi, Klub serta organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk advokasi politik, tetapi juga sebagai tempat bagi perempuan untuk mendiskusikan

isu-isu sosial dan ekonomi yang mempengaruhi mereka secara langsung. Keberadaan organisasi seperti ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya pendukung pasif revolusi, tetapi juga aktor aktif yang memperjuangkan perubahan. Tokoh-tokoh perempuan tertentu juga menonjol melalui tulisan dan advokasi mereka. Olympe de Gouges, misalnya, adalah seorang penulis dan aktivis yang terkenal dengan "*Deklarasi Hak-Hak Perempuan dan Warga Perempuan*" yang ia tulis pada tahun 1791 (Thompson, 2015).

Pada bulan Maret 1791, sebuah undang-undang disahkan yang menjamin pemerataan harta benda orang yang meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat. Konstitusi tahun 1791 mendefinisikan usia kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan dalam istilah yang sama. Pada tahun 1792, diakui bahwa perempuan memiliki kecerdasan dan kemandirian yang memadai untuk memberikan kesaksian dalam dokumen publik dan membuat komitmen sesuai keinginan mereka. Pada tahun 1793 mereka diizinkan memiliki bagian dalam properti komunal, namun hak yang dimaksud adalah hak sipil, bukan hak politik (ÇAKMAK, 2007)

Perempuan yang pro-Revolusi maupun anti-Revolusi selalu menjadi jembatan antara aktivis dan masyarakat selama terjadinya pemberontakan. Namun tidak bisa dikatakan semua perempuan menjalankan aktivitasnya karena kepentingan politik. Sedemikian rupa sehingga muncul kerumunan perempuan yang memberontak hanya untuk menyatakan reaksinya terhadap kenaikan harga pangan. Namun dalam beberapa kasus, ketika ada tujuan tertentu, seperti pembebasan seorang tahanan, perempuan selalu berada di garda depan perjuangan. Perempuan biasanya yang memulai pemberontakan terlebih dahulu dan bahkan menuduh laki-laki yang tidak mengambil tindakan sebagai pengecut. Kemudian laki-laki akan bergabung dengan perempuan, dan kemudian di tengah kerumunan laki-laki dan perempuan, perempuan akan bergerak di belakang laki-laki dan memainkan peran pendukung (ÇAKMAK, 2007).

Berikut adalah bentuk partisipasi perempuan dalam revolusi, diantaranya : Pendudukan Istana Bastille pada 14 Juli 1789, perlawanan setelah raja tidak menyetujui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Sipil pada Oktober 1789, kontinental Champ de Mars pada 17 Juli 1791 dan penghapusan total kekuasaan monarki pada tahun 1792. Mereka juga hadir dalam perlawanan dan pemberontakan, seperti konflik Jacobin-Gironden pada bulan Juni 1793 dan pemberontakan Mei 1795. Meskipun perempuan memainkan peran dalam perlawanan ini, perempuan dikesampingkan ketika organisasi-organisasi revolusioner mendominasi gerakan. Namun, karena revolusi memerlukan struktur yang terorganisir, perempuan tidak dapat mengambil bagian dalam institusi revolusioner tersebut (ÇAKMAK, 2007). Pada tanggal 6 Maret 1792, kelompok perempuan mengajukan petisi kepada Majelis Nasional dengan terkumpulnya tanda tangan lebih dari 300 perempuan Paris, meminta pembentukan unit militer wanita sebagai unit Garda Nasional. Namun, permohonan itu ditolak (ÇAKMAK, 2007).

Perjuangan Atas Hak Perempuan dalam Revolusi

Selama Revolusi Prancis, perempuan mulai menuntut hak-hak yang lebih besar, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun awalnya revolusi difokuskan pada hak asasi manusia secara umum, tidak semua perubahan yang diperjuangkan oleh para revolusioner laki-laki mencakup hak-hak perempuan. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang diadopsi pada tahun 1789, misalnya, tidak secara eksplisit menyebutkan perempuan, sehingga banyak dari mereka merasa perlu untuk mengadvokasi hak-hak mereka sendiri (Dr. Ajay Bhargava & Ashok Kumar Malviya, 2019). Meskipun berbagai institusi politik bangkit dan runtuh satu demi satu, “fondasi sosial yang ditetapkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia tetap tidak tergoyahkan. Piagam tahun 1814, serta Konstitusi tahun 1852, secara eksplisit mengakui prinsip-prinsip dasar ini” (Кротов, 2023) Perempuan seperti Olympe de Gouges menanggapi ini dengan *menulis "Deklarasi Hak-Hak Perempuan dan Warga Perempuan"* pada tahun 1791, yang menuntut kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Perempuan juga memperjuangkan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Mereka menuntut hak untuk memilih dan duduk di badan legislatif, meskipun upaya ini sering kali ditolak oleh mayoritas laki-laki yang memegang kekuasaan. Hak ini diharapkan dapat mengakhiri pengucilan perempuan dari politik. Pengucilan perempuan dalam ranah politik sebagai ketidakadilan. Sehingga, situasi tersebut merupakan ekspresi dari persepsi bahwa laki-laki adalah satu-satunya wakil umat manusia yang sejati dan tidak memandang perempuan sebagai makhluk rasional (Çakmak, 2007)

Hak-hak sosial dan ekonomi juga menjadi fokus perjuangan perempuan selama revolusi. Mereka menuntut akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta upah yang setara dengan laki-laki. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga yang memicu kelaparan, tetapi para bangsawan masih menikmati pesta di dalam istana. Hal ini meningkatkan eskalasi politik rakyat, memunculkan penyerbuan Penjara Bastille, mars perempuan di istana Versailles, dan lahirnya Konvensi Nasional (Rokhim et al., 2023). Perancis lebih rentan terhadap ketidakpastian upah riil dibandingkan orang Inggris sehingga menyebabkan kondisi pemerintahan yang tidak stabil yang berpotensi timbulnya perang dan kekacauan sehingga mengganggu proses pertumbuhan Perancis (Sharp & Weisdorf, 2012). Diperparah dengan sifat ekonomi Perancis yang relatif tertutup sehingga menyebabkan perekonomian Perancis menjadi lebih tertutup sehingga menyebabkan rentan terhadap guncangan lokal (Sharp & Weisdorf, 2012)

Perempuan dari kelas pekerja yang berpartisipasi dalam pawai dan demonstrasi sering kali membawa isu-isu ini ke depan, menuntut perbaikan kondisi kerja dan harga pangan yang lebih terjangkau. Keberanian mereka dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi membantu mendorong perubahan dalam kebijakan sosial yang lebih inklusif, meskipun perubahan ini tidak selalu bersifat permanen atau sepenuhnya memadai. Bahkan, perempuan juga menuntut hak untuk memilih suaminya sendiri atau kebebasan untuk menceraikan suaminya (Çakmak, 2007). Meskipun perempuan berhasil membuat beberapa kemajuan penting selama revolusi, banyak dari

hak-hak yang mereka perjuangkan tidak diwujudkan secara penuh atau segera setelah revolusi berakhir. Pemerintahan pasca-revolusi sering kali mengabaikan atau menolak tuntutan perempuan, dan mereka kembali terpinggirkan dalam banyak aspek kehidupan politik dan sosial. Namun, perjuangan perempuan selama Revolusi Prancis menandai awal dari gerakan feminis yang lebih luas dan memberikan inspirasi bagi upaya-upaya selanjutnya untuk mencapai kesetaraan gender. Upaya mereka menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya merupakan bagian dari penonton dalam peristiwa besar sejarah, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu mempengaruhi arah perubahan sosial dan politik (Sharp & Weisdorf, 2012).

KESIMPULAN

Revolusi membuka lembaran baru dalam sejarah perempuan. Pada Revolusi Perancis, terjadi ketimpangan distribusi peran yang dihadapi perempuan dari semua kelas dan kelompok politik. Sebagai syarat pembagian peran ini; Laki-laki akan mengurus politik di ranah publik, dan perempuan akan mengurus keluarganya di ranah privat. Perempuan memainkan peran penting selama Revolusi Prancis abad ke-18, dengan berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, organisasi politik, dan advokasi hak-hak mereka, meskipun menghadapi banyak hambatan. Meskipun hak-hak yang mereka perjuangkan tidak sepenuhnya diwujudkan pasca revolusi, kontribusi dan keberanian mereka membuka jalan bagi gerakan feminis masa depan. Perjuangan mereka menunjukkan pentingnya mengakui peran perempuan dalam sejarah dan dampak jangka panjang dari upaya mereka dalam mempromosikan kesetaraan gender dan perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Muara Padiatra. (2020). *Ilmu Sejarah : Metode Dan Parktik*. Penerbit JSI Press.
- ÇAKMAK, D. (2007). Woman in the French Revolution: Deficient Citizen. *Ege Akademik Bakış Dergisi*, 7(2), 727–745.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39842/472487>
- Dr. Ajay Bhargava, & Ashok Kumar Malviya. (2019). The Chronicle of French Revolution in Alejo Carpentier's Explosion in a Cathedral. *The Creative Launcher*, 4(5), 41–49. <https://doi.org/10.53032/tcl.2019.4.5.07>
- Livesey, J. (2009). The Limits of Terror: the French Revolution, Rights and Democratic Transition. *Thesis Eleven*, 97(1), 64–80.
<https://doi.org/10.1177/0725513608101909>
- Marit, R. (1996). *Kadın Filozoflar Antik Çağdan Aydınlanmaya Kadar*, çev. Tomris Mengüşoğlu. Kabcacı Yayınevi.
- McPhee. (2016). *Liberty or death: The French Revolution*. Yale University Press.
- Metha Jaya, I. M. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Graha

Ilmu.

- Nina Herlina. (2020). *METODE SEJARAH* (Revisi 2020). Satya Historika.
- Rahman, F., & Weda, S. (2018). Students' perceptions in appreciating english literary works through critical comment: A case study at hasanuddin university and universitas negeri makassar. *Asian EFL Journal*, 20(12.3), 149–172.
- Robitaille, M. (2009). The French Revolution and the Discourse of Change in Restoration France and Post-1815 England. *Past Imperfect*, 15. <https://doi.org/10.21971/p7359c>
- Rokhim, M. N., Nugroho, Y. E., & Suratno, P. (2023). Semangat Revolusi Prancis Dan Patriotisme Napoleon Bonaparte Dalam Perspektif Baru Sastra Jawa. *Atavisme*, 26(1), 14–30. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v26i1.879.14--30>
- Rosenfeld, S. (2019). The French revolution in cultural history. *Journal of Social History*, 52(3), 555–565. <https://doi.org/10.1093/jsh/shy078>
- Scoot, N. R., & Mentor, J. C. (2022). An Enemy of The French Revolution: Examining Louis XVI's Role in The French Revolution. *IUSscholar Works Journalas*, 4(1), 41–72.
- Sharp, P. R., & Weisdorf, J. L. (2012). French revolution or industrial revolution? A note on the contrasting experiences of England and France up to 1800. *Cliometrica*, 6(1), 79–88. <https://doi.org/10.1007/s11698-011-0071-6>
- Syawal, L. O. M. I., Rahman, F., & P., M. A. (2022). Social Condition of French Society pre-revolution in A Tale of Two Cities Novel by Charles Dickens. *TEKSTUAL*, 20(1), 37. <https://doi.org/10.33387/tekstual.v20i1.4507>
- Tackett. (2015). *The coming of the Terror in the French Revolution*. Harvard University Press.
- Thompson, T. R. (2015). *Gendered Nations : The French Revolution and Women ' s Political Participation*.
- Кротов, А. А. (2023). Interpretasi Revolusi Perancis sebagai sarana peramalan politik: tentang konsep Paul Janet. *Filsafat Sejarah Filsafat*, 1(3), 244–260. <https://doi.org/10.21638/>